

Buka mata hati hingga lebih tahu dari yang sebenarnya kita tidak ingin tahu



Gambar 1. Taman Goeroe.

PENDAHULUAN

Policy brief ini menyajikan kontribusi pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menghasilkan peserta didik berkarakter. Fakta menunjukkan bahwa pertumbuhan karakter peserta didik belum memadai sesuai dengan harapan dan kebutuhan bangsa dan negara yang cepat berubah. Di berbagai daerah di DIY, banyak anak yang terlibat dalam output sosial negatif (*klitih*, pelemparan batu, kekerasan dan kriminalitas lainnya). Ini berarti realitas subjektif anak tidak sesuai dengan realitas objektif lingkungannya, ada kesenjangan antara pengalaman pribadi anak dengan dunia di luarnya. Selain karena ada fakta tingkat kemiskinan yang tinggi di DIY, patut diduga karakter anak yang tidak memadai ini telah mendorong tingginya angka putus sekolah di DIY. Karakter yang kurang memadai di sekolah-sekolah terjadi karena substansi pendidikan yang kurang kontekstual.

Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan garis hidup bangsa (kultural-nasional) dan ditujukan untuk keperluan perikehidupan (*maatschaappelijk*) yang dapat mengangkat derajat negeri dan rakyatnya sehingga bersamaan kedudukan dan pantas bekerja sama dengan lain-lain bangsa untuk kemuliaan segenap manusia di seluruh dunia (Ki Hadjar Dewantara). Rumusan tujuan pendidikan nasional sepanjang sejarah pendidikan nasional bagaimanapun pernah mengalami perubahan-perubahan nuansa. Seperti tampak pada pasal-pasal berikut:

“Tujuan pendidikan dan pengadjaran ialah membentuk manusia susila yang tjakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesedjahteraan masyarakat dan tanah air.” (Pasal 3 UU Nomor 4 Tahun 1950)

“Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia

Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.” (Pasal 4 UU Nomor 2 Tahun 1989)

“bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” (Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2003)

Menyimak perbedaan nuansa tujuan dalam pasal berbagai undang-undang sistem pendidikan nasional itu, perubahan strategis tujuan kebijakan pendidikan di DIY sangat dimungkinkan tergantung pada inisiatif masyarakat yang dipimpin oleh gubernur, kepala daerah dan DPRD.

PERMASALAHAN

Realitas subjektif anak tidak sesuai dengan realitas objektif lingkungannya, ini berarti ada kesenjangan antara pengalaman pribadi anak didik dengan dunia di luarnya yang kemudian berakibat pada kenakalan dan putus sekolah.



Gambar 2. Promosi belajar prematur (*gege mangsa*).

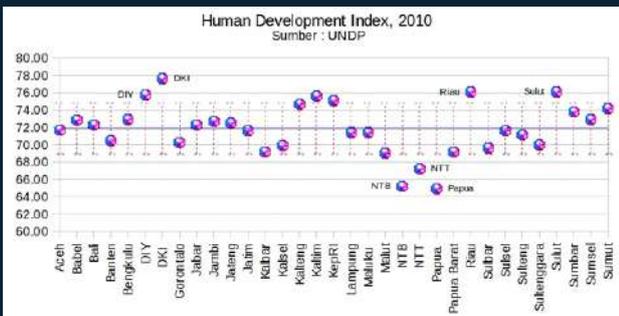
Gambar 3. Promosi belajar yang selaras dengan umur anak (*angon mangsa*).

METODE

Komite Rekonstruksi Pendidikan (KRP) DIY (dibentuk oleh Dewan Pendidikan Provinsi DIY pada tahun 2007) sejak terbentuknya telah mengakumulasi pengalaman, pengamatan, dan pemikiran mengenai proses pendidikan di DIY. Proses itu dijalankan melalui diskusi-diskusi terpumpun (FGD) rutin dua minggu sekali yang diikuti oleh praktisi dan pemerhati pendidikan dari berbagai kalangan, termasuk dari universitas-universitas di Yogyakarta. Hasil diskusi yang sangat panjang itu terkristalisasi dalam *policy brief* ini.

HASIL

Indeks Pendidikan¹ DIY termasuk yang paling tinggi di Indonesia, bahkan Angka Partisipasi Murni (APM)² DIY (95,12) pada tahun 2015/2016 lebih tinggi dari APM Nasional (93,38). Meskipun secara kuantitatif pendidikan di DIY relatif baik-baik saja, namun secara kualitatif masih mencemaskan.



Gambar 4. Human Development Index (HDI) Indonesia 2010, DIY nomor dua tertinggi setelah Daerah Khusus Ibukota. Indeks Pendidikan menjadi salah satu komponen HDI.

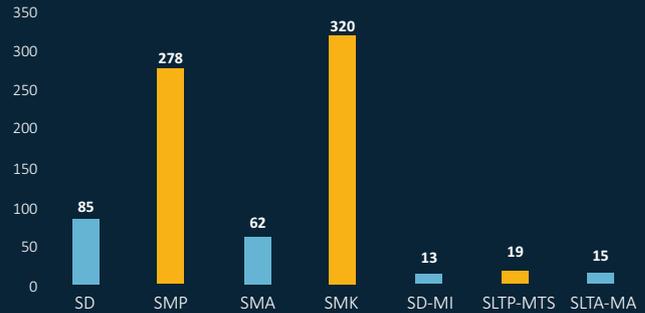
Angka putus sekolah tertinggi di DIY terjadi pada tingkat SMP (278 orang) dan SMK (320 orang). Meskipun wajib belajar 12 tahun telah dilaksanakan di DIY, tetapi putus sekolah di tingkat SMP dan SMK masih terjadi. Meskipun belum ada data statistiknya, alasan putus sekolah di SMP sangat mungkin terkait dengan risiko yang harus ditanggung oleh peserta didik, terutama yang ingin cepat bekerja, bila melanjutkan studi ke jenjang selanjutnya. Ini terlihat antara lain dari tingginya angka putus sekolah pada jenjang SMK yang biasanya diisi oleh anak-anak yang tidak mau melanjutkan ke perguruan tinggi dan ingin cepat bekerja. Masuk SMK ternyata tetap berisiko untuk anak-anak yang ingin segera bekerja.

¹ Indeks pendidikan terdiri dari *average years of schooling*, *expected years of schooling*, dan *education index* termasuk salah satu komponen untuk mengukur *human development index* (*gross national income*, *average years of birth*, *education index*).

² Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.

Jumlah Murid Putus Sekolah di DI Yogyakarta berdasar Jenjang Sekolah 2015/2016

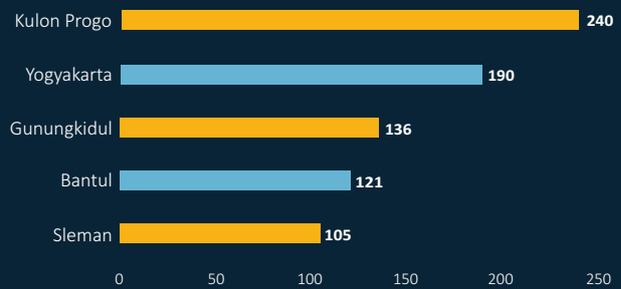
Sumber: BPS



Ada perbedaan tingkat putus sekolah antar daerah. Ternyata, tingkat putus sekolah di Kulon Progo dan Kotamadya Yogyakarta di atas rata-rata DIY.

Jumlah Murid Putus Sekolah seluruh Jenjang Sekolah di Kabupaten/Kota di DI Yogyakarta 2015/2016

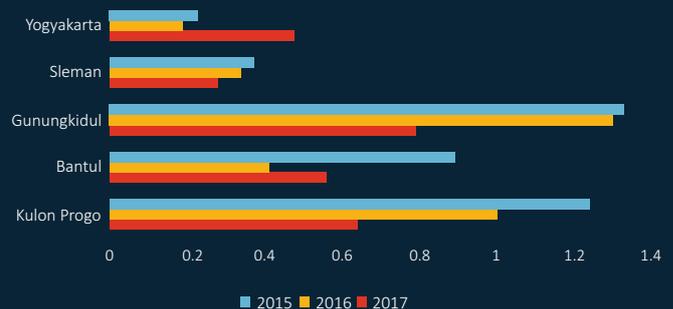
Sumber: BPS



Tingginya angka putus sekolah di SMP dan SMA perlu diperhatikan karena mungkin terkait dengan karakter peserta didik, selain terkait dengan kondisi ekonomi keluarga. Angka keparahan kemiskinan menunjukkan bahwa Kotamadya Yogyakarta paling rendah, tetapi tingkat putus sekolahnya tinggi. Sementara itu, meskipun angka keparahan kemiskinannya tertinggi di DIY, tetapi angka putus sekolah di Gunungkidul di bawah rata-rata DIY. Ini mengindikasikan bahwa karakter peserta didik merupakan salah satu faktor yang penting bagi partisipasi kelanjutan peserta didik di sekolah. Karakter peserta didik (output positif/negatif pendidikan) ditentukan lebih oleh kualitas substansi pendidikan, tergantung pada kesadaran kritis peserta didik yang seharusnya difasilitasi oleh proses pendidikan.

Angka Keparahannya Kemiskinan DIY 2015/2017

Sumber: BPS



Studi etnografi oleh para peneliti di Jurusan Antropologi Budaya UGM “menunjukkan kesenjangan antara apa yang dapat diperoleh peserta didik dari sekolah dengan pengalaman dan kebutuhan sehari-hari yang mereka pelajari dalam komunitasnya masing-masing. Dalam berbagai kasus anak-anak itu belajar hidup mengandalkan naluri yang mereka akumulasi di luar sekolah. Sementara pengetahuan sekolah cenderung menjadi bahan retorika dan ritual” (dulu sekolah memiliki pembayangan atas masa depan, sekarang anak sekolah mengalami entropi loyo/nglokro). “Krisis akulturasi yang mereka rasakan tidak mereka temukan jawabannya di sekolah. Dalam kasus-kasus tertentu, anak-anak menjadi nekat.” Hanya dalam beberapa kasus, secara kreatif anak-anak itu membangun pengetahuannya secara mandiri dan efektif. Tamasiswa yang jelas-jelas punya cita-cita mengembangkan” kemerdekaan (karakter anti-penjajahan) “serta seni mendidik yang sangat komprehensif” pun masih menghadapi banyak hambatan dan masih memerlukan kebijakan yang konstruktif (Laksono dkk, 2015:158).



Gambar 5, 6, & 7. Mengembangkan kemampuan baca perlu langkah konsentrik, tidak lepas dari tautan masa lalu.

Banyak lagi persoalan yang menghambat pengembangan karakter peserta didik, antara lain:

1. Nilai dari sekolah cenderung menjadi patokan perkembangan sosial budaya anak.
2. Pelajaran bahasa Jawa sebagai bahasa ibu menjadi momok bagi siswa.
3. Jam anak di sekolah durasinya terlalu panjang, bahkan sampai anak ketika berada di komunitas masih harus berurusan dengan tugas sekolah.
4. Anak lebih dituntut menghafal daripada memahami.
5. Kebebasan berpikir anak dibatasi.
6. Sekolah menjual ketakutan, seperti mengiklankan keamanan sekolah, kemampuan sekolah dalam mendidik anak.
7. Anak kurang dikenalkan pada lingkungannya.
8. Pendidikan tidak menawarkan alternatif lain selain lulus atau gagal berkaitan dengan menilai usaha belajar anak.

9. Pendidikan masih menyerap energi keluarga yang masif (aturannya: tidak boleh memungut biaya dalam bentuk apapun).
10. Norma dari pendidikan belum selaras dengan baik dengan norma yang dilaksanakan dalam masyarakat.
11. Sekolah berusaha mengambil alih peran keluarga dan komunitas dalam mendidik anak, sementara kalau terjadi kegagalan sekolah justru terkesan lepas tangan dan menyalahkan keluarga dan komunitas karena dianggap kurang mampu. Sementara keluarga dan komunitas sudah terlanjur menyerahkan pendidikan anak kepada sekolah.



Gambar 8 & 9. Belajar itu kontekstual.

PERSPEKTIF ANALISIS

Pendidikan di DIY, melalui Trikon (kepamongan) akan mentautkan peserta didik dengan dunia di luar dirinya (bangsa, negara dan dunia) sehingga secara terus menerus mampu menemukan jiwanya yang merdeka sebagai bangsa Indonesia.

KESIMPULAN

Setelah mempelajari berbagai persoalan pendidikan dalam mengembangkan karakter peserta didik, dapat disimpulkan bahwa pendidikan di DIY masih memiliki ruang luas untuk melakukan perubahan kebijakan. Arah perubahan kebijakan terutama menyangkut pengembangan karakter terkait dengan pengembangan sosial anak; sistem evaluasi proses belajar yang membesarkan hati peserta didik; hubungan peserta didik dengan dunia di luarnya menggunakan bahasa ibu; pengembangan psikomotorik; kemampuan kendali diri; dan pengembangan partisipasi keluarga dan masyarakat.

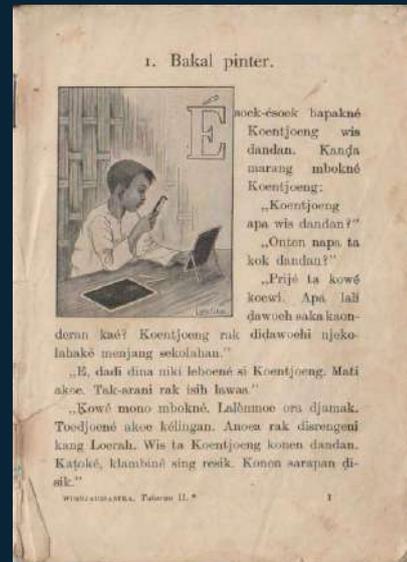
PILIHAN KEBIJAKAN

Masalah pendidikan yang begitu besar dari perspektif pemajuan kebudayaan nasional secara reflektif dan kritis dalam diskusi-diskusi terpumpun KRP DIY dapat diatasi melalui usaha yang bersungguh-sungguh dan terus menerus. Efektivitas program-program pendidikan secara terus menerus dapat dijamin bagi pembentukan karakter peserta didik untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, pilihan kebijakan untuk pendidikan di DIY adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan kebijakan yang berfokus pada pengembangan karakter mencakup usia PAUD sampai kelas tiga sekolah dasar, mengingat sensorik anak mulai berkembang di usia 3,5 hingga 7 tahun dan masih memerlukan masa peralihan dari lingkungan keluarga ke lingkungan sekolah paling tidak selama dua tahun.
2. Mengingat penggunaan nilai angka yang telah menghambat perkembangan sosial anak, maka sebaiknya ada kebijakan untuk menyelenggarakan sistem evaluasi proses belajar yang menghindari penggunaan nilai angka agar karakter gotong royong dan apresiatif atau menghargai orang lain dan lingkungan sekitarnya dapat berkembang. Pendidikan itu membesarkan hati, peserta didik bebas, tidak dihantui ketakutan dan kecemasan.
3. Anak-anak mampu menghubungkan dirinya dengan informasi-informasi dari luar. Untuk itu lembaga pendidikan perlu melatih anak-anak mampu menceritakan kembali pengalaman yang dilihat, didengar dan dirasakan dalam bahasa ibunya.



Gambar 10. Ki Hadjar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional asal Yogyakarta.



Gambar 11. "Bakal Pinter" itu ternyata mengikuti asas Trikon.

4. Anak-anak dilatih mampu mengekspresikan pengalaman dan melatih keterampilan secara kolaboratif melalui permainan-permainan, seni dan olahraga. Peserta didik mampu mengembangkan psikomotoriknya agar peserta didik tidak bosan dan punya ruang untuk mengartikulasikan diri.
5. Melatih disiplin, sopan santun, kejujuran, olah hati, olah rasa, olah pikir, olah jasmani agar anak mampu secara mandiri mengontrol dirinya.
6. Perlu meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat secara sistematis dalam pendidikan di sekolah sesuai situasi dan kondisi sosial setempat.

DAFTAR BACAAN

- Dewantara, Ki Hadjar. 2011. *Bagian II: Kebudayaan*. Yogyakarta: Yayasan Persatuan Tamansiswa.
- Laksono, P.M. dkk. 2015. *Antropologi Pendidikan, Aneh: Biasanya Tidak Apa-Apa*. Yogyakarta: Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada dan Kepel Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

SUMBER FOTO

- Museum Tamansiswa Dewantara Kirti Griya
<http://jualbukuantik.blogspot.co.id/2010/08/koentjoeng-bawoek.html>
- <http://www.jetses.nl/Indische%20Boeken.html>
- <http://whitepaperconcept.com/legenda-buku-belajar-budi-dan-ani/>
- <https://www.slideshare.net/ifiksf/buku-1-tematik-tema-1-kelas-1>